



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; PEMUDA DAN OLAHRAGA;  
PARIWISATA; EKONOMI KREATIF; RISTEKDIKTI; DAN PERPUSTAKAAN  
NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Persidangan ke-	: IV (Empat)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: <b>Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI</b>
	: <b>Senin, 8 Juni 2015</b>
Waktu	: <b>Pukul 10.30 – 18.25 WIB</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>H. M. Sohibul Iman, Ph.D./Wakil Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	: 1. Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI Tahun 2014; 2. Perkembangan Penyusunan PP terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Negeri Baru; 3. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015; 4. Pembahasan RKA K-L dan RKP K-L Tahun 2016; dan 5. Lain-lain
Hadir	: 38 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, beserta jajarannya

**I. PENDAHULUAN**

Setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, Ketua Komisi X DPR RI/H.M. Sohibul Iman, Ph.D., membuka Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI pada pukul 10.30 WIB.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

## II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

### A. HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN 2014

1. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemenristekdikti RI yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2014.
2. Komisi X DPR RI mengharapkan kepada Kemenristekdikti RI agar:
  - a) Secara terus menerus meningkatkan tata kelola kinerja keuangan agar temuan yang sifatnya sejenis / berulang dapat diminimalisir, akuntabel, transparan, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
  - b) Melakukan koordinasi dengan Kemenkeu RI untuk menerbitkan kebijakan tata kelola yang lebih tepat tentang PNBK pada PTN Satker.
  - c) Pencatatan aset tetap di Kemenristekdikti RI perlu ditingkatkan validitasnya.

### B. PENGAWASAN DAN REALISASI PELAKSANAAN APBN TAHUN 2015

1. Terkait dengan Mutu, Komisi X DPR RI mengharapkan kepada Kemenristekdikti RI untuk:
  - a) Mendorong percepatan terbentuknya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di setiap provinsi;
  - b) Sebelum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terbentuk, Kemenristekdikti RI agar mengoptimalkan kinerja kopertis dalam pengawasan, pengendalian, dan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Terkait dengan relevansi, Komisi X DPR RI mengharapkan Kemenristekdikti RI mensinkronkan sasaran strategis dengan dunia kerja.
3. Terkait dengan Akses, Komisi X DPR RI mendorong Kemenristekdikti RI agar:
  - a) Meningkatkan kualitas layanan program beasiswa agar tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.
  - b) Menertibkan penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin sebagaimana amanat UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Terkait dengan Daya Saing, Komisi X DPR RI mengharapkan Kemenristekdikti RI untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan jumlah inovasi.

### C. RKP-RKA/KL TAHUN 2016

1. Komisi X DPR RI masih perlu mendalami pagu indikatif Kemenristekdikti RI untuk RAPBN tahun 2016 sebesar Rp44.987.978.612.000,- (*Empat puluh empat triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah*).

2. Dalam rangka pembahasan RKP dan RKA-K/L 2016 yang akan datang, Komisi X DPR RI mengharapkan Kemenristekdikti RI untuk menguraikan alokasi anggaran berdasarkan sasaran strategis, prioritas dan non prioritas, serta menyampaikan kebutuhan anggaran yang belum terdani dalam pagu indikatif RAPBN 2016.
3. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi, Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI untuk meningkatkan bantuan pada PTS.

#### **D. LAIN-LAIN**

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemenristekdikti RI atas proses yang telah dilakukan dalam mencari jalan keluar untuk penuntasan status pegawai PTS yang menjadi PTN Baru.
2. Komisi X DPR RI mengapresiasi dan mendukung Kemenristekdikti RI dalam membenahan tata kelola perguruan tinggi utamanya terkait dengan ijazah palsu selanjutnya bekerjasama dengan penegak hukum untuk menegakkan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi X DPR RI mendorong segera diterbitkan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai mana amanat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 18.25 WIB

**KETUA,**



**H.M. SOHIBUL IMAN, Ph.D.**